



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke - 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 15 September 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 11.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Penetapan hasil pembahasan Alokasi Anggaran menurut fungsi & Program K/L dalam RKA K/L TA 2021 sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2021.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nanik Sulistyawati, S.A.P
Hadir Anggota	: Fisik 19 Orang dan Virtual 25 Orang (44 Orang) dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Bapel BPWS beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan semua mitra Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Penetapan hasil pembahasan Alokasi Anggaran menurut fungsi & Program K/L dalam RKA K/L TA 2021 sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2021.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya terhadap jawaban pertanyaan yang telah disampaikan oleh mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rangkaian pembahasan anggaran Tahun 2020.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan tanggapannya terhadap rincian program dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga/Badan mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Bapel-BPWS terhadap pagu anggaran masing-masing Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bapel-BPWS dalam RAPBN TA 2021 sesuai dengan Nota Keuangan sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT KERJA/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2021	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2021	SELISIH
		A	B	B-A
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	140.325.000.000	149.811.139.618	9.486.139.618*
a.	Sekretariat Jenderal	675.000.000	748.203.897	73.203.897
b.	Inspektorat Jenderal	125.000.000	101.744.238	(23.255.762)
c.	Ditjen Bina Marga	48.000.000.000	53.956.803.391	5.956.803.391
d.	Ditjen Cipta Karya	27.000.000.000	26.561.232.790	(438.767.210)
e.	Ditjen Sumber Daya Air	50.000.000.000	58.547.808.016	8.547.808.016
f.	Ditjen Perumahan	12.000.000.000	8.093.921.257	(3.906.078.743)
g.	Ditjen Bina Konstruksi	900.000.000	757.684.410	(142.315.590)
h.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	275.000.000	206.177.709	(68.822.291)
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.000.000.000	563.788.892	(436.211.108)
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	350.000.000	273.775.018	(76.224.982)
2.	Kementerian Perhubungan	75.754.039.461	45.664.041.141	(30.089.998.320)
a.	Sekretariat Jenderal	1.192.044.515	716.034.249	(476.010.266)
b.	Inspektorat Jenderal	123.659.910	121.549.942	(2.109.968)
c.	Ditjen Perhubungan Darat	14.625.115.800	7.645.859.063	(6.979.256.737)
d.	Ditjen Perhubungan Laut	15.356.541.517	11.428.194.813	(3.928.346.704)
e.	Ditjen Perhubungan Udara	19.656.166.138	10.558.628.167	(9.097.537.971)
f.	Ditjen Perkeretaapian	14.225.556.468	11.103.444.048	(3.122.112.420)
g.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	309.679.449	197.993.171	(111.686.278)
h.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	8.719.001.750	3.541.750.595	(5.177.251.155)
i.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	1.546.273.914	350.587.093	(1.195.686.821)
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.108.894.870	3.689.809.142	(419.085.728)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT KERJA/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2021	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2021	SELISIH
		A	B	B-A
a.	Sekretariat Jenderal	236.313.363	213.500.000	(22.813.363)
b.	Inspektorat Jenderal	56.221.873	50.000.000	(6.221.873)
c.	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi	302.140.694	291.233.571	(10.907.123)
d.	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.280.066.461	2.161.952.880	(118.113.581)
e.	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	166.130.532	93.335.600	(72.794.932)
f.	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	170.045.786	125.509.293	(44.536.493)
g.	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	158.247.130	87.916.994	(70.330.136)
h.	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	393.240.736	339.627.160	(53.613.576)
i.	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	346.488.295	326.733.644	(19.754.651)
4.	BMKG	3.701.091.732	3.274.241.507	(426.850.225)
a.	Program Dukungan Manajemen	482.384.255	360.900.326	(121.483.929)
b.	Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3.218.707.477	2.913.341.181	(305.366.296)
5.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	4.012.367.954	2.267.460.260	(1.744.907.694)
a.	Program Dukungan Manajemen	1.123.393.564	859.573.479	(263.820.085)
b.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	2.888.974.390	1.407.886.781	(1.481.087.609)
6.	Bapel-BPWS	244.027.000	156.377.732	(87.649.268)
a.	Program Dukungan Manajemen	36.025.000	28.066.296	(7.958.704)
b.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	208.002.000	128.311.436	(79.690.564)

* Terdapat penambahan anggaran antara lain untuk kegiatan ketahanan pangan, infrastruktur kawasan industri dll sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas

- Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bapel-BPWS sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2021 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan alokasi anggaran pada RAPBN TA 2021 terhadap ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

Jakarta, 15 September 2020

KETUA RAPAT,



LASARUS

**MENTERI DESA, PDT,
DAN TRANSMIGRASI,**



ABDUL HALIM ISKANDAR

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**



BAGUS PURUHITO

KEPALA BMKG,



DWIKORITA KARNAWATI

Plt. KEPALA BAPEL BPWS,



ACHMAD HERRY MARZUKI